KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Jumlah komisioner KPU diusulkan menjadi sembilan orang, tepatkah?
Tanggal : Minggu, 01 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Jumlah Komisioner KPU Diusulkan Menjadi Sembilan Orang, Tepatkah?

Jumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diwacanakan bertambah dari tujuh menjadi sembilan orang. Sebaliknya, jumlah komisioner KPU provinsi dan kabupaten/kota justru berpotensi dikurangi menjadi tiga atau lima orang, bergantung pada jumlah pemilih, luas wilayah, kondisi geografis, dan beban kerja.

Wacana ini muncul dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 yang menjadi bahan penyusunan naskah akademik revisi Undang-Undang Pemilu. Namun, usulan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan mengatakan, jumlah komisioner KPU RI saat ini dinilai belum memadai untuk menangani beban kerja pemilu serentak. Penambahan dua anggota diperlukan agar pembagian tugas lebih efektif, terutama saat tahapan pemilu memasuki masa sibuk.

"Pertimbangannya itu, kenapa sembilan, karena tujuh dalam evaluasi kami ketika pemilu serentak itu kurang memadai. Jadi kita harus nambah sekitar dua lagi," ujar Irawan kepada wartawan, Jumat (23/10/2026).

Menurut Irawan, penataan jumlah anggota tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas kelembagaan penyelenggara pemilu dengan mempertimbangkan kompleksitas pelaksanaan pemilu ke depan.

Selain penambahan jumlah anggota, DPR juga mengkaji pemangkasan durasi rekrutmen penyelenggara pemilu. Irawan mengatakan proses seleksi yang saat ini berlangsung selama enam bulan ingin dipersingkat menjadi dua hingga tiga bulan.

"Kalau kita lihat durasi rekrutmen kan enam bulan. Nah, itu juga kami ingin melakukan pemilu yang efisien, yang efektif. Dalam hitungan kami, dua sampai tiga bulan cukup untuk menyelenggarakan pemilu berkualitas," ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kahfi Adlan Hafiz, menilai penambahan anggota KPU perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan kebutuhan. Menurut dia, jika persoalannya adalah beban kerja KPU yang semakin berat, solusinya bukan menambah jumlah komisioner.

"Kalau bebannya berat, mungkin yang perlu ditambah petugas (karyawan) KPU-nya," ungkap Kahfi kepada *Rakyat Merdeka*, Jumat (30/10/2026).

Untuk mengetahui pandangan Ahmad Irawan dan Kahfi Adlan Hafiz terkait usulan penambahan jumlah komisioner KPU menjadi sembilan orang, berikut wawancaranya.

AHMAD IRAWAN,
Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar

Beban Kerjanya Makin Bertambah Dan Berat



> Dengan beban kerja dan sistem pemilihan seperti itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebutuhan penyelenggara Pemilu harus diperkuat.

Anda menyebutkan ada opsi penambahan jumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari tujuh menjadi sembilan orang. Bisa dijelaskan?

Begini, kami melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 dan 2024. Kedua pemilu ini dilaksanakan secara serentak, yaitu pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres). Ternyata, beban kerja penyelenggara cukup berat, baik dari sisi teknis maupun manajemen penyelenggaraan. Selain itu, ada juga penanganan sengketa hukum terkait Pemilu itu sendiri.

Wilayah kita luas dan jumlah pemilihnya banyak. Dengan beban kerja dan sistem pemilihan seperti itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebutuhan penyelenggara Pemilu harus diperkuat. Karena itu, saya mengatakan bahwa DPR sedang mempertimbangkan opsi, apakah jumlah komisioner tetap tujuh orang seperti sekarang atau bertambah menjadi sembilan orang. Namun, jika menjadi sembilan orang, harus jelas bagaimana pembagian bidang kerjanya.

Seperti apa beban kerja yang dimaksud berat tersebut?

Dalam evaluasi itu memang ada sejumlah persoalan yang muncul. Misalnya, banyaknya gugatan dan pelanggaran hukum, serta penanganan sengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Belum lagi penanganan kode etik dan persoalan sejenisnya. Itulah latar belakang secara sosiologis. Namun, opsinya bukan hanya menambah jumlah komisioner dari tujuh menjadi sembilan orang, melainkan juga mengurangi jumlahnya.

Maksudnya mengurangi?

Iya, ada opsi mengurangi jumlah komisioner, khususnya di tingkat kabupaten/kota yang wilayahnya kecil dan jumlah pemilihnya sedikit. Tentu kita perlu melakukan penyesuaian. Namun, itu baru sebatas brainstorming berdasarkan hasil evaluasi. Sementara itu, pembahasannya masih dinamis dan belum ada yang disepakati.

Menurut Anda sendiri, apakah penambahan komisioner KPU diperlukan?

Secara objektif, ini merupakan bagian dari persoalan teknis dan sistem. Nanti kita lihat terlebih dahulu sistem seperti apa yang disepakati, kemudian tahapan dan beban penyelenggaraannya. Dari situlah kita baru bisa melihat kebutuhan turunannya seperti apa.

Namun, proses diskusi masih berkembang. Jadi, persoalannya bukan sekadar menambah jumlah komisioner dari tujuh menjadi sembilan orang. Kalau pun kita mau menambah satu orang, itu juga tidak bisa karena jumlahnya nanti menjadi genap. Jadi, harus ditambah menjadi ganjil.

Peneliti Perludem, Kahfi Adlan Hafiz, menilai bahwa jika beban kerja berlebih, yang perlu ditambah adalah petugas KPU, bukan jumlah komisionernya. Apa tanggapan Anda?

Koordinasi yang dilakukan komisioner KPU juga bersifat teknis. Sementara itu, di tingkat nasional, para pimpinan KPU merumuskan kebijakan dan harus mengambil keputusan-keputusan strategis. Dalam hal ini, terkait manajemen tahapan, manajemen penyelenggaraan, penyelesaian sengketa hukum, serta koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, fungsi utamanya adalah merumuskan tahapan itu sendiri. ■ NNM

KAHFI ADLAN HAFIZ,
Peneliti Perludem

Menambah Komisioner Perlu Argumentasi Kuat

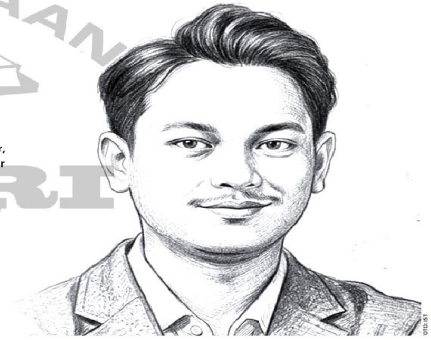

> Kalau dirasa beban kerja KPU terlalu besar, mengapa tidak berpikir untuk menambah personel KPU saja, karena yang ditambah pelaksana teknis.

Bagaimana Anda melihat terkait usulan penambahan jumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sembilan orang di sejumlah daerah?

Betul bahwa beban pekerjaan di KPU dan Bawaslu pada periode Pemilu pasti sangat berat. Bayangkan saja, saat Pemilu, mereka harus menjalankan tugas untuk melayani 290 juta warga negara Indonesia. Namun, perlu dilihat lagi apakah ada hubungan antara jumlah komisioner dan beban kerjanya.

Jadi, ketika ada masalah, kemudian disimpulkan bahwa beban kerjanya berat dan solusinya adalah menambah jumlah komisioner, saya kira kesimpulan itu belum memiliki dasar ilmiah yang kuat. Kita perlu alasan yang kuat terkait penambahan jumlah komisioner ini.

Jadi, menurut Anda, alasan untuk menambah komisioner KPU belum cukup kuat?

Nah, dari yang saya lihat dalam diskursus ini, banyak orang berandai-andai dan kemudian membuat asumsi secara luas tanpa dasar ilmiah. Persoalannya begini, anggota KPU itu bukan pelaksana teknis. Betul, mereka penyelenggara Pemilu, tetapi bukan mereka yang mengerjakan tugas-tugas teknisnya.

Fungsi mereka adalah melakukan koordinasi dan kemudian mengambil keputusan melalui kebijakan-kebijakan Pemilu yang memang *reliable* dan memiliki dasar yang kuat. Jadi, saya kira kita juga tidak bisa mengatakan bahwa keduanya tidak berhubungan. Namun, hal yang perlu dibuktikan adalah apakah ada hubungan antara jumlah komisioner dan beban kerja.

Adakah alasan lain yang perlu dipertimbangkan dalam usulan penambahan komisioner KPU?

Kondisi ekonomi sedang sulit dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas. Kalau kemudian ingin menambah jumlah komisioner KPU, tentu ada konsekuensi berupa penambahan anggaran.

Apakah anggaran saat ini juga belum memadai?

Nah, apakah penambahan itu relevan dengan kondisi ekonomi sekarang.

Apa solusi dari Anda agar pelaksanaan Pemilu tetap berjalan dengan baik tanpa penambahan komisioner KPU?

Kalau dirasa beban kerja KPU terlalu besar, mengapa tidak berpikir untuk menambah personel KPU saja. Itu lebih masuk akal karena yang ditambah adalah personel yang memang bekerja secara teknis untuk menyelenggarakan tahapan-tahapan Pemilu.

Selain itu?

Kedua, mengapa tidak terpikir untuk menyederhanakan tahapan-tahapan Pemilu dengan memaksimalkan sistem informasi. KPU hampir di setiap tahapan sudah memiliki sistem informasinya sendiri.

Jadi, jangan sampai penambahan ini hanya untuk mengakomodasi kelompok-kelompok politik, misalnya. Sebab, hal tersebut justru akan berdampak pada integritas Pemilu itu sendiri.

Jadi, saya kira kita perlu berpikir lebih teknokratis dan efektif. Untuk menyelesaikan beban kerja yang berat ini, solusinya bukan dengan menambah jumlah komisioner. Sebab, komisioner mau ditambah sampai seratus orang pun tidak akan menyelesaikan masalah. ■ NNM